# BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea keempat telah menegaskan bahwa tujuan bernegara adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan kertertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial

Sejalan dengan tujuan bernegara tersebut, Negara memiliki kewajiban untuk mewujudkan tujuan bernegara tersebut kepada seluruh masyarakat Indonesia termasuk masyarakat yang hidup di daerah Kepulauan. Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) merupakan negara kepulauan yang terdiri dari pulau-pulau besar maupun kecil yang menurut perhitungan Dinas Hidro Oseanografi (Dishidros) pada tahun 1982 seluruhnya berjumlah 17.508 pulau di mana terdapat 5.707 pulau mempunyai nama dan 11.801 pulau yang tak bernama dengan garis pantai sepanjang 108.000 Km serta luas wilayah perairan yang mencapai 7,9 juta Km². Eksistensi NKRI sebagai negara kepulauan telah diakui oleh dunia melalui Konvensi Hukum Laut PBB (*United Nations Convention on the Law of the Sea*/UNCLOS 1982). Wilayah perairan NKRI lebih luas dari daratan, yaitu 1:3.

Walaupun merupakan Negara Kepulauan tetapi perlindungan dan perlakuan khusus terhadap daerah kepulauan di Indonesia belum dilakukan. Padahal terdapat sebanyak 60% penduduk atau sebanyak 140 juta penduduk Indonesia bermukim di wilayah pesisir, di mana 22% dari mereka tinggal di desa pesisir dan pulau-pulau terpencil yang selama ini kurang tersentuh oleh pembangunan. Disamping itu pendekatan kebijakan pembangunan di Indonesia selama ini dilakukan dengan pendekatan pembangunan kawasan yang berorientasi pada daratan padahal di daerah kepulauan memiliki karakteristik yang berbeda misalnya pola pengendalian wilayah dan pola komunikasi yang membutuhkan pendekatan pembangunan yang berbeda dengan daratan. Kecilnya Dana yang diterima oleh Daerah kepulauan menyulitkan pemerintah daerah dalam memberdayakan pulau-pulau kecil di dalam provinsi kepulauan apalagi yang berada di wilayah perbatasan. Berdasarkan hal itu maka diperlukan sebuah kebijakan berupa undang – undang yang mengatur dan dapat menjadi rujukan bagi daerah kepulauan dalam melakukan pembangunan di daerahnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Argumentasi yang telah dijelaskan di atas merupakan pengakuan bahwa dari aspek regulasi pembangunan di daerah kepulauan masih lemah sehingga diperlukan sebuah materi pembanding di negara kepulauan lainnya yaitu Negara Kuba. Kuba merupakan salah satu Negara Kepulauan yang memiliki karakteristik yang khas dan sama dengan Indonesia yaitu terdiri dari ribuan pulau. Oleh karena itu merupakan hal yang menarik apabila Badan Legislasi bisa berdiskusi, belajar dan menarik ilmu untuk dituangkan dalam draf Rancanagan Undang-Undang tentang percepatan pembangunan daerah kepulauan berdasarkan dari pengalaman Negara Kuba dalam melakukan pembangunan di daerah kepulauan.

#### B. URGENSI

Badan Legislasi DPR RI sebagai alat kelengkapan yang ditugasi untuk menyusun RUU tentang Percepatan Pembangunan Daerah Kepulauan perlu mencari banyak masukan dari Negara Kuba sebagai salah satu Negara Kepulauan di Dunia dalam rangka pengayaan materi penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Percepatan Pembangunan Daerah Kepulauan, sehingga diharapkan RUU tersebut nantinya benar-benar dapat bermanfaat dan menjawab kebutuhan hukum masyarakat, khususnya yang terkait dengan pola kebijakan yang tepat bagi pembangunan daerah kepulauan, alokasi pembiayaan bagi masyarakat di daerah kepulauan.

Dengan pertimbangan tersebut, Badan Legislasi DPR RI memandang perlu, relevan, dan penting untuk melakukan Kunjungan Kerja sebagai bahan komparasi untuk pengayaan dan pendalaman materi dalam penyusunan RUU tentang Percepatan Pembangunan Daerah Kepulauan.

Negara Kuba merupakan Negara Kepulauan yang terdiri atas ribuan pulau. Namun dalam waktu bersamaan, Negara Kuba tetap dapat melakukan pendistribusian pembangunan bagi masyarakat di daerah kepulauan. Dengan kondisi seperti ini, tentu saja Negara Kuba mempunyai sebuah sistem dan kapasitas yang memadai dalam pengelolaan pembangunan di daerah kepulauan.

#### C. TUJUAN DAN KEGUNAAN

- 1. Tujuan Kunjungan Kerja BALEG DPR RI adalah memperluas wawasan dan pengetahuan serta mengumpulkan informasi dan data yang relevan mengenai pola pembangunan bagi masyarakat yang hidup di daerah kepulauan di KUBA untuk dapat dijadikan masukan dalam rangka penyusunan RUU tentang Percepatan Pembangunan Daerah Kepulauan.
- Adapun kegunaan diselenggarakannya Kunjungan Kerja ini adalah untuk memperoleh data atau pembanding dari Negara KUBA sebagai salah satu dari Negara Kepulauan sehingga BALEG DPR RI dapat menyusun formula pembangunan daerah kepulauan yang lebih komprehensif dan berdaya jangkau jauh ke depan.

#### D. HASIL YANG DIHARAPKAN

Hasil kunjungan kerja diharapkan dapat menjadi bahan masukan yang kongkret untuk penyusunan RUU tentang Percepatan pembangunan Daerah Kepulauan, khususnya yang terkait dengan pola pembangunan dan perlakuan khusus yang dilakukan oleh Pemerintah KUBA.

Atas dasar tersebut di atas, diharapkan BALEG DPR RI dapat menghasilkan produk legislasi yang mempunyai arah dan jangkauan yang komprehensif, khususnya dalam hal penyusunan RUU tentang Percepatan Pembangunan Daerah Kepulauan yang benar-benar bermanfaat bagi masyarakat yang hidup di pulau-pulau terpencil yang tersebar dalam daerah kepulauan.

# E. Jadwal Acara

Program kunjungan kerja Badan Legislasi ke Kuba telah dilaksanakan selama 7 (tujuh) hari, yaitu mulai tanggal 11 s/d tanggal 17 Maret 2012. Berikut adalah jadwal acara kunjungan:

### **JADWAL ACARA**

NO.	HARI/TGL/JAM	ACARA	KETERANGAN
1.	Minggu, 11 Maret 2012		
	16.30 WIB	Tim berkumpul di Terminal 2E Bandara Soekarno-Hatta.	Dikoordinasikan oleh Set. Baleg
	19.25 WIB	Berangkat menuju Amsterdam untuk transit	KLM ROYAL DUTCH KL 810.
2.	Senin, 12 Maret 2012		
	05.50	Tiba di Amsterdam	Transit +/- 04 Jam
	10.00	Take Off menuju Havana, Cuba	KLM Royal Dutch Kkl 721
	14.45	Tiba di Havana, Cuba	
	15.55	Menuju Hotel Melia Cohiba	
	16.30	Tiba di Hotel, Check in dan Istirahat	Melia Cohiba Hotel
	18.30	Menuju Wisma Duta	Paseo e/1ra y 3rs
	19.00 – 20.30	Pertemuan dengan Duta Besar LBBPP RI Havana, Drs. Teiseran Foun Cornelis dan staf KBRI dilanjutkan santap malam	Wisma Duta
	20.30	Kembali ke Hotel, Acara Bebas/Istirahat di Hotel	
3.	Selasa, 13 Maret 2012		
	08.00	Delegasi Sarapan Pagi	
	08.45	Menuju tempat pertemuan	
	09.00-10.30	Pertemuan dengan Ketua Komisi Hukum dan Konstitusi Parlemen Kuba (Comision de Asuntos Constitucionales y juridicos de la Asamblea Nacional del Poder Popular), <b>Mr.</b> <b>Jose Luis Toledo Santander</b>	Tempat: Fakultas Hukum Universitas Havana

	1	1	,
	11.30 – 13.00	Pertemuan dengan Wakil Ketua Komisi Masalah Ekonomi Parlemen Kuba (Comision de Asuntos Economicos de la Asamblea Nacional del Poder Popular), <b>Mr.</b> <b>Roberto Barrier Castro.</b>	Tempat: Pusat Pengkajian Ekonomi Dunia (Centro de Investigaciones Economia Mundial/CIEM)
	13.15 – 15.00	Makan Siang di Restoran Lokal	Tempat: TBA
	18.30 - 20.30	Pertemuan dengan Ketua Parlemen/Kepala pemerintah Daerah Munisipal Khusus Pulau Pemuda (Isla de Juventud), Mr. Ramon Sanchez Causelo dilanjutkan dengan makan malam	Tempat: Guest House milik Parlemen Kuba Diatur oleh Parlemen Kuba
	20.30	Kembali ke Hotel	
4.	Rabu,14 Maret 2012		
	07.00	Delegasi Sarapan Pagi	
	08.30	Menuju Provinsi Pinar del Rio	
	11.00	Tiba di Pinar del Rio	
	11.00 – 12.00	Pertemuan dengan Direktur Hubungan Internasional pemerintah Daerah Provinsi Pinar del Rio, Mr. Juan Palacio Menendez	Ikut hadir dalam pertemuan: Mr. Jesus Rivera Jaime, Direktur Hubungan dan Kerjasama Internasional Munisipal La Palma dan Mr. Carmelo perez Martinez, Direktur UBPC "Los Guerrilleros"
		Kunjungan ke UBPC (Koperasi) "Los Guerrilleros" di Municipal La Palma. UBPC (Unida Basica de Produccion Cooperativa) "Los Guerrilleros".	
	12.00	Menuju Pulau Levisa (Cayo Levisa) dengan perahu dari Palma Rubia, Pinar del Rio	
	12.30	Tiba di Cayo Levisa	
	12.30-15.00	Kunjungan di Cayo Levisa dilanjutkan makan siang di restoran "Ranchon Galeon"	Cayo Levisa, Munisipal La Palma
	15.00	Kembali ke Palma Rubia, Pinar del Rio dengan perahu	
	15.30	Tiba di Pinar del Rio dan	

		kembali ke Havana dengan Bus	
	17.30	Tiba di Hotel	
	19.00	Makan Malam	Tempat: TBA
5.	Kamis, 15 Maret 2012		
	08.00	Delegasi Sarapan Pagi	
	09.00-11.45	Internal Meeting, membahas hasil kunjungan	
	11.45	Menuju Wisma Duta untuk makan siang	Wisma Duta
	13.30	Menuju Bandara	
	17.05.	Take Off menuju Amsterdam	KLM ROYAL DUTCH KL 721
6.	Jumat, 16 Maret 2012		
	10.00	Tiba di Amsterdam	Transit +/- 11 jam
	20.50	Take Off menuju Jakarta	KLM ROYAL DUTCH KL 809
7.	Sabtu, 17 Maret 2012		
	18.10	Tiba di Jakarta	

# E. Daftar Nama Delegasi

Delegasi Badan Legislasi yang berkunjung ke Kuba berjumlah 16 (enam belas) orang, dengan rincian:

- 1 (Satu) Ketua Delegasi
- 2 (dua) orang wakil ketua Delegasi
- 10 (Sepuluh) orang Anggota Delegasi
- 1 (satu) Staf Sekretariat Badan Legislasi
- 2 (dua) Tenaga Ahlu

Tabel 1.2. Daftar Delegasi

1. H. A. Dimyati Natakusumah, SH., MH., M. Si  2. Ignatius Mulyono  F-PD/A-495  Chairman of Legislation Council  3. Anna Muawanah, SE.MH.  F-PKB/A-169  Vice Chairman of Legislation Council  4. Paula Sinjal, SH  F-PD/A-555  Member of Parliament  5. Nurul Arifin, S.IP., M.Si  F-PG/A-214  Member of Parliament  6. Drs. H.M. Ade Surapriatna, SH, MH  F-PG/A-236  7. Ir. Aliwongso Halomoan Sinaga  F-PG/A-180  Member of Parliament  8. Prof. Dr. Hendrawan Supratikno  F-PDIP/A-372  Member of Parliament  9. Eddy Mihati  F-PDIP/A-374  Member of Parliament  10. KH. Aus Hidayat Nur  F-PKS/A-94  Member of Parliament  KH. Muhammad Unais Ali Hisyam  F-PKB/A-171  Drs. H. Achmad Rubaie, SH., MH  F-PAN/A-134  Member of Parliament  SEKRETARIS DELEGASI  NIP. 19670806199 0031003  PENELITI P3DI  PENELITI P3DI  PENELITI P3DI	NO.	NAMA	FRAKSI / NO.ANGG	KETERANGAN
2. Ignatius Mulyono P-PD/A-493 Council  3. Anna Muawanah, SE.MH. F-PKB/A-169 Vice Chairman of Legislation Council  4. Paula Sinjal, SH F-PD/A-555 Member of Parliament  5. Nurul Arifin, S.IP., M.Si F-PG/A-214 Member of Parliament  6. Drs. H.M. Ade Surapriatna, SH, MH F-PG/A-236  7. Ir. Aliwongso Halomoan Sinaga F-PG/A-180 Member of Parliament  8. Prof. Dr. Hendrawan Supratikno F-PDIP/A-372 Member of Parliament  9. Eddy Mihati F-PDIP/A-374 Member of Parliament  10. KH. Aus Hidayat Nur F-PKS/A-94 Member of Parliament  11. KH. Muhammad Unais Ali Hisyam F-PKB/A-171 Member of Parliament  12. Drs. H. Achmad Rubaie, SH., MH F-PAN/A-134 Member of Parliament  13. Drs. H. Zainut Tauhid Sa'adi, M.Si F-PPP/A-305 NIP. 19670806199 0031003 NIP. 19810502200 PENELITI P3DI	1.		F.PPP/A-290	I ***
4. Paula Sinjal, SH F-PD/A-555 Member of Parliament 5. Nurul Arifin, S.IP., M.Si F-PG/A-214 Member of Parliament 6. Drs. H.M. Ade Surapriatna, SH, MH F-PG/A-236 Member of Parliament 7. Ir. Aliwongso Halomoan Sinaga F-PG/A-180 Member of Parliament 8. Prof. Dr. Hendrawan Supratikno F-PDIP/A-372 Member of Parliament 9. Eddy Mihati F-PDIP/A-374 Member of Parliament 10. KH. Aus Hidayat Nur F-PKS/A-94 Member of Parliament 11. KH. Muhammad Unais Ali Hisyam F-PKB/A-171 Member of Parliament 12. Drs. H. Achmad Rubaie, SH., MH F-PAN/A-134 Member of Parliament 13. Drs. H. Zainut Tauhid Sa'adi, M.Si F-PPP/A-305 Member of Parliament 14. Dadang Prayitna, S.IP., SH., MH. 19670806199 0031003 15. Ari Mulianta Ginting, SE., M.Si. NIP. 19810502200 PENELITI P3DI	2.	Ignatius Mulyono	F-PD/A-495	
4. Paula Sinjal, SH F-PD/A-555  5. Nurul Arifin, S.IP., M.Si F-PG/A-214 Member of Parliament  6. Drs. H.M. Ade Surapriatna, SH, MH F-PG/A-236 Member of Parliament  7. Ir. Aliwongso Halomoan Sinaga F-PG/A-180 Member of Parliament  8. Prof. Dr. Hendrawan Supratikno F-PDIP/A-372 Member of Parliament  9. Eddy Mihati F-PDIP/A-374 Member of Parliament  10. KH. Aus Hidayat Nur F-PKS/A-94 Member of Parliament  11. KH. Muhammad Unais Ali F-PKB/A-171 Member of Parliament  12. Drs. H. Achmad Rubaie, SH., MH F-PAN/A-134 Member of Parliament  13. Drs. H. Zainut Tauhid Sa'adi, M.Si F-PPP/A-305 Member of Parliament  14. Dadang Prayitna, S.IP., SH., MH. NIP. 19670806199 0031003  15. Ari Mulianta Ginting, SE., M.Si. PENELITI P3DI  15. PRELITI P3DI	3.	Anna Muawanah, SE.MH.	F-PKB/A-169	
6. Drs. H.M. Ade Surapriatna, SH, MH  7. Ir. Aliwongso Halomoan Sinaga F-PG/A-236  8. Prof. Dr. Hendrawan Supratikno F-PDIP/A-372 Member of Parliament  9. Eddy Mihati F-PDIP/A-374 Member of Parliament  10. KH. Aus Hidayat Nur F-PKS/A-94 Member of Parliament  11. KH. Muhammad Unais Ali Hisyam F-PKB/A-171 Member of Parliament  12. Drs. H. Achmad Rubaie, SH., MH  13. Drs. H. Zainut Tauhid Sa'adi, M.Si F-PPP/A-305 Member of Parliament  14. Dadang Prayitna, S.IP., SH., MH.  15. Ari Mulianta Ginting, SE., M.Si.  16. Member of Parliament  17. Member of Parliament  18. NIP.  19. SEKRETARIS DELEGASI  19. PENELITI P3DI	4.	Paula Sinjal, SH	F-PD/A-555	Member of Parliament
6. Drs. H.M. Ade Surdpriatria, SH, MH  7. Ir. Aliwongso Halomoan Sinaga F-PG/A-180 Member of Parliament  8. Prof. Dr. Hendrawan Supratikno F-PDIP/A-372 Member of Parliament  9. Eddy Mihati F-PDIP/A-374 Member of Parliament  10. KH. Aus Hidayat Nur F-PKS/A-94 Member of Parliament  11. KH. Muhammad Unais Ali Hisyam F-PKB/A-171 Member of Parliament  12. Drs. H. Achmad Rubaie, SH., MH F-PAN/A-134 Member of Parliament  13. Drs. H. Zainut Tauhid Sa'adi, M.Si F-PPP/A-305 Member of Parliament  14. Dadang Prayitna, S.IP., SH., MH. 19670806199 0031003  15. Ari Mulianta Ginting, SE., M.Si. 19810502200 9121002 PENELITI P3DI	5.	Nurul Arifin, S.IP., M.Si	F-PG/A-214	Member of Parliament
8. Prof. Dr. Hendrawan Supratikno F-PG/A-180  9. Eddy Mihati F-PDIP/A-372 Member of Parliament  10. KH. Aus Hidayat Nur F-PKS/A-94 Member of Parliament  11. KH. Muhammad Unais Ali Hisyam F-PKB/A-171 Member of Parliament  12. Drs. H. Achmad Rubaie, SH., MH F-PAN/A-134 Member of Parliament  13. Drs. H. Zainut Tauhid Sa'adi, M.Si F-PPP/A-305 Member of Parliament  14. Dadang Prayitna, S.IP., SH., MH. NIP. 19670806199 0031003  15. Ari Mulianta Ginting, SE., M.Si. 19810502200 9121002 PENELITI P3DI	6.	· ·	F-PG/A-236	Member of Parliament
9. Eddy Mihati F-PDIP/A-374 Member of Parliament 10. KH. Aus Hidayat Nur F-PKS/A-94 Member of Parliament 11. KH. Muhammad Unais Ali Hisyam F-PKB/A-171 Member of Parliament 12. Drs. H. Achmad Rubaie, SH., MH F-PAN/A-134 Member of Parliament 13. Drs. H. Zainut Tauhid Sa'adi, M.Si F-PPP/A-305 Member of Parliament 14. Dadang Prayitna, S.IP., SH., MH. 19670806199 0031003 15. Ari Mulianta Ginting, SE., M.Si. 19810502200 PENELITI P3DI	7.	Ir. Aliwongso Halomoan Sinaga	F-PG/A-180	Member of Parliament
10. KH. Aus Hidayat Nur F-PKS/A-94 Member of Parliament  KH. Muhammad Unais Ali Hisyam F-PKB/A-171 Member of Parliament  12. Drs. H. Achmad Rubaie, SH., MH F-PAN/A-134 Member of Parliament  13. Drs. H. Zainut Tauhid Sa'adi, M.Si F-PPP/A-305 Member of Parliament  14. Dadang Prayitna, S.IP., SH., MH. 19670806199 0031003  NIP. 19670806199 O031003  NIP. 19810502200 PENELITI P3DI  15. Ari Mulianta Ginting, SE., M.Si. 19810502200 9121002	8.	Prof. Dr. Hendrawan Supratikno	F-PDIP/A-372	Member of Parliament
11. KH. Aus Hidayat Nur F-PKS/A-94  11. KH. Muhammad Unais Ali Hisyam  12. Drs. H. Achmad Rubaie, SH., MH F-PAN/A-134 Member of Parliament  13. Drs. H. Zainut Tauhid Sa'adi, M.Si F-PPP/A-305 Member of Parliament  14. Dadang Prayitna, S.IP., SH., MH. 19670806199 0031003  15. Ari Mulianta Ginting, SE., M.Si. 19810502200 PENELITI P3DI 9121002	9.	Eddy Mihati	F-PDIP/A-374	Member of Parliament
11. KH. Munammad Unals All Hisyam  12. Drs. H. Achmad Rubaie, SH., MH  13. Drs. H. Zainut Tauhid Sa'adi, M.Si  14. Dadang Prayitna, S.IP., SH., MH.  15. Ari Mulianta Ginting, SE., M.Si.  16. P-PKB/A-171  F-PKB/A-171  F-PKB/A-171  F-PKB/A-171  Member of Parliament  Member of Parliament  NIP.  19670806199 0031003  NIP.  19810502200 9121002  PENELITI P3DI	10.	KH. Aus Hidayat Nur	F-PKS/A-94	Member of Parliament
13. Drs. H. Zainut Tauhid Sa'adi, M.Si F-PPP/A-305 Member of Parliament  14. Dadang Prayitna, S.IP., SH., MH. 19670806199 0031003  15. Ari Mulianta Ginting, SE., M.Si. 19810502200 PENELITI P3DI 9121002	11.		F-PKB/A-171	Member of Parliament
13.         Drs. H. Zainut Tauhid Sa'adi, M.Si         F-PPP/A-305           14.         Dadang Prayitna, S.IP., SH., MH.         NIP.             19670806199             0031003         SEKRETARIS DELEGASI           15.         Ari Mulianta Ginting, SE., M.Si.         NIP.             19810502200             9121002         PENELITI P3DI	12.	Drs. H. Achmad Rubaie, SH., MH	F-PAN/A-134	Member of Parliament
14.       Dadang Prayitna, S.IP., SH., MH.       19670806199 0031003       SEKRETARIS DELEGASI         15.       Ari Mulianta Ginting, SE., M.Si.       NIP. 19810502200 9121002       PENELITI P3DI 9121002	13.	Drs. H. Zainut Tauhid Sa'adi, M.Si	F-PPP/A-305	Member of Parliament
15. Ari Mulianta Ginting, SE., M.Si. 19810502200 PENELITI P3DI 9121002	14.	Dadang Prayitna, S.IP., SH., MH.	19670806199	SEKRETARIS DELEGASI
14 Pramaartha Pada S IP M Si TENIACA AUI I	15.	Ari Mulianta Ginting, SE., M.Si.	19810502200	PENELITI P3DI
16. Transactina rode 3.11., M.Si - TENAGA ATE	16.	Pramaartha Pode S.IP., M.Si	-	TENAGA AHLI